

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Studi ini bertujuan menguraikan dampak Pajak Daerah, PDRB, DAU dan DAK terhadap IPM di provinsi-provinsi Indonesia. Seluruh informasi yang dipergunakan ialah data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi resmi BPS dan DJPK. Populasi penelitian mencakup seluruh provinsi di Indonesia, dan sampel dipilih menggunakan teknik seleksi purposif sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Seluruh provinsi di Indonesia yang tercatat resmi pada Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.	38
2	Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki data tidak lengkap dan tidak berturut-turut mengenai variabel penelitian (independen dan dependen) yang dapat diverifikasi oleh BPS atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada saat dimulainya penelitian.	(1)
3	Provinsi-provinsi yang tidak mengalami perluasan wilayah selama periode pengamatan, sehingga menjamin bahwa data yang digunakan konsisten dan mudah dibandingkan.	(4)
Jumlah Sampel Penelitian		33
Jumlah Data Penelitian (33 x 5)		165

Sumber: Data sekunder yang diolah (2026)

Berdasarkan kriteria di atas, terdapat lima provinsi yang dikeluarkan dari sampel, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Keempat provinsi tersebut merupakan hasil pemekaran yang baru terbentuk dan belum memiliki data fiskal serta IPM yang lengkap dan konsisten sepanjang

periode pengamatan. Selain itu, ada DKI Jakarta yang dikeluarkan dari sampel. Karena provinsi tersebut satu-satunya provinsi yang tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAU) secara penuh dalam sebagaimana periode pengamatan akibat statusnya sebagai ibu kota negara dalam kapasitas fiskal tertinggi di Indonesia. Hal ini menyebabkan distribusi variabel DAU menjadi sangat tidak normal dan bias secara statistik apabila DKI Jakarta diikutsertakan. Dengan demikian, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 165 observasi (33 Provinsi × 5 tahun)

4.2 Analisis Deskriptif

Rincian data yang disajikan mencakup total sampel, nilai minimum, nilai maksimum, rerata (*mean*), varians, dan deviasi standar. Statistika deskriptif sendiri didefinisikan sebagai kumpulan data yang memuat variabel-variabel penelitian sepanjang periode pengamatan.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	165	61,22	81,62	73,1022	3,22458
Pajak Daerah	165	370,68	42.395,48	5.664,91	8.060,95
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	165	28.031,44	1.935.810,15	298.996,91	412.927,19
Dana Alokasi Umum (DAU)	165	1.042,97	41.448,58	11.555,21	9.011,86
Dana Alokasi Khusus (DAK)	165	77,61	10.889,72	1.489,90	1.752,24

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Merujuk Tabel 4.2, variabel IPM dalam sampel memiliki nilai minimum sebanyak 61,22 poin, tercatat pada Provinsi Papua tahun 2020, dan nilai maksimum 81,62 poin pada Provinsi DI Yogyakarta tahun 2024. Rata-rata IPM seluruh sampel

adalah 73,10 poin dengan deviasi standar 3,22 poin. Tren peningkatan IPM terlihat konsisten dari rata-rata 71,96 poin pada 2020 menjadi 74,41 poin pada 2024, mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan manusia yang berkelanjutan meski dengan ketimpangan antardaerah yang masih nyata.

Variabel Pajak Daerah menunjukkan rentang yang sangat lebar, dari minimum Rp 370,68 miliar (Sulawesi Barat, 2020) hingga maksimum Rp 42.395,48 miliar (Jawa Barat, 2024), dengan rata-rata Rp 5.664,91 miliar dan deviasi standar Rp8.060,95 miliar. Deviasi standar yang jauh melampaui rata-rata mengindikasikan disparitas kapasitas perpajakan yang sangat besar antara provinsi-provinsi Jawa dan luar Jawa.

Variabel PDRB memperlihatkan variasi paling ekstrem. Nilai minimum Rp 28.031,44 miliar dimiliki Provinsi Maluku Utara (2020), sedangkan maksimum Rp 1.935.810,15 miliar dicapai Jawa Timur (2024), selisih hampir 69 kali lipat. Rata-rata PDRB Rp 298.996,91 miliar dengan deviasi standar Rp4 12.927,19 miliar menegaskan dominasi ekonomi beberapa provinsi besar.

Variabel DAU memiliki minimum Rp 1.042,97 miliar (Banten, 2020) dan maksimum Rp 41.448,58 miliar (Jawa Timur, 2024) dengan rata-rata Rp 11.555,21 miliar. Variabel DAK memiliki rentang dari Rp77,61 miliar (Papua Barat, 2024) hingga Rp 10.889,72 miliar (Jawa Barat, 2021), dengan rata-rata Rp 1.489,90 miliar dan deviasi standar Rp 1.752,24 miliar. Nilai rata-rata DAK dalam cakupan lima tahun lebih tinggi dibandingkan cakupan tiga tahun karena periode 2020–2021 mencakup alokasi DAK yang relatif lebih besar sebagai respons fiskal terhadap pandemi COVID-19.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, sehingga perlu melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Jika variabel bebas atau residu model regresi mengikuti distribusi normal, maka uji tersebut dapat dianggap berhasil. Dengan menggunakan ambang signifikansi sebanyak 5% ($\alpha = 0,05$), uji K-S dipergunakan untuk melakukan uji normalitas. Data residu mengikuti distribusi normal jika nilai signifikansi K-S lebih besar dari 0,05. Data tidak mengikuti distribusi normal jika K-S kurang dari 0,05 (Ghozali, 2021). Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2,86075864
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.051
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS, data diolah 2026

Merujuk pada Tabel 4.3, nilai z hitung untuk *unstandardized residual* sebesar 0,055 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,200. Hasil dari model regresi sesuai dengan distribusi normal, karena tingkat signifikansi sebesar 0,200 lebih tinggi daripada ambang batas 0,05

b. Uji Multikolinearitas

Guna mengetahui bahwa variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi yang bermakna atau memiliki hubungan linier, peneliti menerapkan uji multikolinearitas. Korelasi semacam ini di antara variabel independen dapat merugikan model regresi. Nilai Tolerance dan VIF dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas, demikian menurut Ghozali (2021). Mengingat bahwa VIF kurang dari 10 dan nilai Toleransi lebih dari 0,10, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas. Tabel 4.4 menampilkan hasil uji lengkap.

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	Pajak Daerah	.095	10.565	Multikolinearitas moderat
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	.068	14.605	Multikolinearitas moderat
	Dana Alokasi Umum (DAU)	.217	4.601	Asumsi bebas dari multikolinearitas
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	.279	3.583	Asumsi bebas dari multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Hasil yang diperoleh didalam pengujian pada tabel 4.4 angka VIF ditunjukkan nilai Pajak Daerah sebanyak 10.565; PDRB sebanyak 14.605; DAU sebanyak 4.601; DAK sebanyak 3.583. Selanjutnya, pada angka *tolerance* variabel

Pajak Daerah sebanyak 0.095, PDRB sebanyak 0.068, DAU sejumlah 0.217, dan DAK senilai 0.297. Berdasarkan hasil VIF dan nilai *tolerance* pada penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat gangguan multikolinearitas dalam model regresi Ghozali (2021) menyebutkan untuk mengatasi terjadinya gangguan multikolinearitas yaitu dengan melakukan transformasi variabel atau membuat *adjustment* terhadap standar *error*. Bentuk transformasi data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan transformasi logaritma natural. Selanjutnya, setelah ditransformasi dilakukan kembali uji multikolinearitas yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4.5

**Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas
(setelah dilakukan logaritma natural)**

Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	Pajak Daerah	0,103	9,747	Asumsi bebas dari multikolinearitas
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,092	10,917	Multikolinearitas moderat
	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,345	2,895	Asumsi bebas dari multikolinearitas
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,297	3,365	Asumsi bebas dari multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.5 variabel produk domestik regional bruto menunjukkan nilai VIF sebesar 10.917 yang sedikit melampaui ambang batas 10. Kondisi ini merupakan multikolinearitas moderat yang bersifat inheren pada data fiskal lintas daerah. Sebagaimana Wooldridge (2020), fenomena tingginya VIF pada data agregat tidak melanggar asumsi dasar sepanjang tidak terdapat hubungan

linier yang sempurna antar variabel, sehingga estimasi OLS tetap bersifat *unbiased* (tidak bias).

c. Uji Autokorelasi

Dalam model regresi linier, uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara komponen kesalahan pada periode t dan periode $t-1$. Dalam hal ini, digunakan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2021). Hasil uji autokorelasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

Model	dL	dU	Durbin-Watson	4-dU	Kesimpulan
1	1.696	1.795	1.824	2.205	Asumsi bebas dari autokorelasi

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Pengujian Durbin-Watson menghasilkan nilai DW sejumlah 1,824. Nilai tersebut berada dalam rentang yang diizinkan, yaitu antar dU (1,795) serta 4-dU (2,205), dengan kondisi $1,795 < 1,824 < 2,205$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Saat menguji model regresi terhadap heteroskedastisitas, kita mencari pola-pola yang jelas pada varians residu dari pengamatan. Agar dianggap sempurna, model regresi tidak boleh menunjukkan gejala heteroskedastisitas; kondisi ini dikenal sebagai homoskedastisitas. Untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas, uji Glejser digunakan didalam studi ini. Tidak adanya heteroskedastisitas dalam model

regresi dapat disimpulkan dari hasil uji yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021). Hasil uji glejser disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser

Model		t	Sig.
1	(Constant)	.981	.328
	Pajak Daerah	-.002	.999
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-.617	.538
	Dana Alokasi Umum (DAU)	.791	.430
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-.523	.602

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwasanya semua variabel independen didalam studi ini memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi untuk variabel-variabel berikut adalah sebagai berikut: Pajak Daerah (0,999), PDRB (0,538), DAU (0,430), dan DAK (0,602). Temuan ini menunjukkan bahwa asumsi konvensional untuk model regresi ini telah terpenuhi, karena tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas dalam data.

4.3.2 Uji Hipotesis

Memeriksa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen merupakan tujuan utama studi ini. Studi ini mengkaji bagaimana IPM dipengaruhi oleh PDRB, DAU, DAK, dan penerimaan pajak daerah. Tabel 4.8 menampilkan hasil analisis statistik yang menggunakan regresi linier berganda.

Tabel 4.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a				
		B	t	Sig
1	(Constant)	4.647	38.124	.000
	Pajak Daerah	.047	6.703	.000
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-.012	-1.530	.128
	Dana Alokasi Umum (DAU)	-.034	-5.085	.000
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-.010	-1.812	.072
F hitung		35.544		.000
R		0.686		
R²		0.471		
Adjusted R²		0.457		

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Mengacu Tabel 4.8 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Tingkat IPM yang diharapkan, dengan asumsi nilai nol untuk semua variabel independen, adalah 4,647, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai konstanta.
- Nilai Pajak Daerah adalah 0,047. Angka positif ini berarti bahwa, dengan semua faktor lain tetap sama, IPM akan naik sebanyak 0,047 poin untuk setiap kenaikan satu unit Pajak Daerah.
- Nilai PDRB adalah -0,012. Dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, angka negatif ini menunjukkan bahwa IPM akan turun sebanyak 0,012 untuk setiap penurunan satu unit PDRB.
- Nilai DAU adalah -0,034. Jika semua faktor lain tetap sama, penurunan satu unit dalam DAU akan mengakibatkan penurunan 0,034 poin dalam IPM.

- Nilai DAK adalah -0,010. Dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, angka ini menunjukkan bahwa IPM akan turun sebanyak 0,010 poin untuk setiap penurunan satu unit dalam DAK.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengevaluasi signifikansi keseluruhan model regresi dan mengetahui apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara terpisah atau secara bersama-sama, digunakan uji F. Menurut Ghozali (2021), model dianggap signifikan secara statistik jika nilai Sig. F kurang dari 0,05. Nilai-nilai pada Tabel 4.8 digunakan untuk menghitung nilai F sebanyak 35,544, yang dianggap signifikan secara statistik pada tingkat 0,000. Hal ini membuktikan bahwa variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh semua faktor independen secara bersamaan. Berdasarkan hasil tersebut, tampaknya model regresi yang digunakan didalam studi ini sesuai dan dapat diandalkan.

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien pada penelitian ini merupakan uji yang menggambarkan seberapa jauh keterkaitan variabel dependen yaitu Pajak Daerah, PDRB, DAU, dan DAK terhadap IPM. Hasil analisis pada tabel 4.8, memperlihatkan nilai *Adjusted R²* sejumlah 0.457. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel Pajak Daerah, PDRB, DAU, dan DAK secara simultan berkontribusi sebanyak 45,7% dalam menjelaskan variasi IPM. Sementara itu, sisanya sebanyak 54,3% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian ini. Penggunaan nilai *Adjusted R²* dipilih karena mampu memberikan estimasi kemampuan penjelasan model yang lebih tepat dibandingkan nilai *R Square* biasa.

c. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat diuji signifikansi statistiknya menggunakan uji-t. Berdasarkan Ghozali (2021), nilai t yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa suatu variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Tabel 4.8 menyajikan hasil uji-t yang berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor independen terhadap variabel dependen. Hasilnya menunjukkan:

1. Pada tingkat signifikansi 0,000, nilai t yang dihitung untuk pajak daerah adalah 6,703. Temuan ini menunjukkan bahwa IPM dipengaruhi secara signifikan oleh pajak daerah. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Pada tingkat signifikansi 0,128, nilai t yang dihitung untuk PDRB adalah -1,530. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak berdampak signifikan terhadap IPM. Akibatnya, hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. Pada tingkat signifikansi 0,000, nilai t yang dihitung untuk DAU adalah -5,085. Hipotesis ketiga (H3) ditolak karena data ini menunjukkan bahwa DAU secara signifikan dan negatif memengaruhi IPM.
4. Pada ambang signifikansi 0,072, DAK menghasilkan nilai t yang dihitung sebanyak -1,812. Hasil menunjukkan bahwa DAK tidak secara signifikan memengaruhi IPM, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak.

4.4 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis yaitu uji parsial (uji t) berupa output serta penjelasan pada 4.3.3 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.9 Keputusan Hipotesis

Hipotesis	Hasil Keputusan
H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.	Diterima
H2: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia	Ditolak
H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia	Ditolak
H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia	Ditolak
H5: Pajak Daerah, PDRB, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Diterima

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Dari keputusan tabel 4.9 diperoleh hasil penjelasan yaitu:

4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pajak Daerah menunjukkan nilai t hitung = 6,703 dengan $\text{Sig.} = 0,000 < 0,05$ dan koefisien $B = 0,047$, sehingga H_1 diterima. Pajak Daerah memengaruhi positif serta pesat atas Indeks Pembangunan Manusia. Pajak daerah merupakan variabel dengan kontribusi relatif terbesar dalam model ini.

Interpretasi ini terlihat jelas dalam Tabel 4.2, dimana disparitas kapasitas fiskal yang masif antardaerah di Indonesia, di mana rentang nilai minimum pajak daerah berada pada angka Rp 370,68 miliar (Provinsi Sulawesi Barat, 2020) sedangkan nilai maksimum menyentuh Rp 42.395,48 miliar (Provinsi Jawa Barat, 2024). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan struktur ekonomi industri dan urbanisasi tinggi mampu mengamankan penerimaan pajak daerah yang besar, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penerimaan mandiri yang kokoh inilah

yang menjadi mesin pembiayaan utama (*local taxing power*) bagi pemerintah daerah untuk mengeksekusi belanja publik secara lincah tanpa hambatan birokrasi transfer dari pusat. Dana ini secara riil disalurkan ke program-program jaminan sosial daerah, pembebasan biaya sekolah tingkat menengah, serta penguatan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) kelas regional. Hal ini secara langsung mendongkrak rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup masyarakat lokal, selaras dengan semangat kemandirian fiskal regional yang ditekankan dalam UU No. 1 Tahun 2022.

Temuan ini selaras dengan teori desentralisasi fiskal Oates (1993) yang menyatakan bahwa kapasitas perpajakan lokal yang kuat memungkinkan pemerintah daerah membiayai layanan publik pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial secara lebih mandiri dan responsif. Hasil ini mendukung Saragih (2019) yang membuktikan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di 34 provinsi Indonesia, serta Arrosyid dan Bawono (2023) yang menemukan PAD sebagai komponen pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM.

4.4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hipotesis kedua ditolak karena Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan nilai t sebanyak $-1,530$ pada ambang signifikansi $0,128 > 0,05$. Adapun untuk IPM, PDRB tidak signifikan. Temuan ini bertolak belakang dengan asumsi makroekonomi klasik bahwa pertumbuhan ekonomi linier dengan kesejahteraan manusia. Namun, hasil pada Tabel 4.2, PDRB merupakan variabel dengan tingkat ketimpangan paling ekstrem didalam model penelitian ini.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah melalui indikator deviasi standar yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai rerata pada variabel PDRB. Hal ini mencerminkan bahwa distribusi data PDRB di Indonesia berada pada kondisi abnormal dan mengalami asimetri atau ketimpangan yang sangat ekstrem.

Secara faktual, PDRB Indonesia didominasi secara masif oleh segelintir provinsi metropolitan dan pusat industri di Pulau Jawa seperti, Provinsi Jawa Timur yang menyentuh nilai maksimum ekstrim sebesar Rp 1.935.810,15 miliar. Di sisi lain, mayoritas provinsi di luar Pulau Jawa memiliki basis ekonomi kecil dengan nilai minimum hanya sebesar Rp 28.031,44 miliar (Provinsi Maluku Utara. Tinggi nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi makro nasional tidak mencerminkan pemerataan pendapatan riil di tingkat akar rumput. Peningkatan PDRB di daerah luar Jawa sering kali bersifat *capital-intensive* (padat modal) yang bertumpu pada sektor ekstraktif dan dikuasi oleh korporasi besar. Karena perputaran uang dan keuntungan ekonomi tersebut kembali mengalir ke pusat atau investor, masyarakat lokal tidak mendapatkan dampak tetesan ke bawah (*trickle down effect*) berupa peningkatan pendapatan, daya beli, maupun akses jaminan kesehatan dan pendidikan. Akibat data yang abnormal dan bias konsentrasi ekonomi inilah, variabel PDRB kehilangan daya dorongnya secara statistik terhadap peningkatan skor IPM di Indonesia secara agregat.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Fahma Arrosyid dan Dwi Bayu Bawono (2023) yang mengindikasikan adanya celah distribusi ekonomi regional di Indonesia. Namun, hasil ini berkontradiksi dengan penelitian Maulana dan Ichsan (2022) serta Nurul Fatimah *et al.* (2019) yang menyatakan PDRB berpengaruh

positif terhadap IPM. Perbedaan ini terjadi karena penelitian ini menggunakan cakupan nasional yang fluktuasi ketimpangan ekonominya jauh lebih makro dan abnormal daripada penelitian regional yang sampel wilayahnya cenderung homogen.

4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hipotesis ketiga ditolak karena uji Dana Alokasi Umum menghasilkan nilai t sebanyak -5,085, tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, dan koefisien B sebanyak -0,034. Dalam hal IPM, DAU memiliki dampak negatif yang signifikan. Peningkatan alokasi transfer DAU secara statistik justru berbanding terbalik dengan arah perbaikan nilai indeks pembangunan manusia di daerah.

Nilai DAU nasional memiliki rata-rata sebesar Rp 11.555,21 miliar dengan sebaran minimum Rp 1.042,97 miliar (Banten) hingga maksimum Rp 41.448,58 miliar (Jawa Timur). Secara regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, DAU diposisikan sebagai *horizontal equalization grant*. Implikasinya, terdapat mekanisme *reverse causality* yang didesain oleh pemerintah pusat, dimana daerah-daerah yang secara struktural memiliki pertumbuhan IPM rendah, angka kemiskinan tinggi, dan kapasitas fiskal mandiri yang lemah justru secara otomatis diprioritaskan untuk menerima suntikan transfer DAU dalam porsi yang jauh lebih besar agar celah fiskalnya tertutupi (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa daerah-daerah kepulauan terpencil atau wilayah Indonesia Timur secara konsisten mendapatkan porsi transfer DAU yang besar untuk menopang jalannya pemerintah daerah, meskipun secara historis

capaian pertumbuhan IPM mereka masih tertinggal di level bawah. Sebaliknya, daerah-daerah perkotaan dengan kapasitas fpajak mandiri yang tinggi hanya memperoleh DAU minimum, tetapi pertumbuhan IPM mereka sudah matang dikategori sangat tinggi. Pola distribusi asimetris inilah yang menyebabkan model regresi menangkap adanya korelasi negatif antara DAU dan pertumbuhan IPM. Temuan korelasi negatif dan signifikan ini secara konsisten mendukung hasil penelitian Evi Sulastri dan Efendri (2021) di Kalimantan serta Pieter Noisirifan de Fretes (2017) di Papua yang membuktikan bahwa peningkatan DAU tidak serta-merta diikuti oleh perbaikan efektivitas nilai IPM di daerah.

4.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus menunjukkan t hitung = $-1,812$ dengan $\text{Sig.} = 0,072 > 0,05$, sehingga H_4 ditolak. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara teoritis, DAK dirancang sebagai *specific grant* (anggaran bertujuan khusus) yang wajib dialokasikan langsung untuk pemenuhan pelayanan dasar komoditas publik sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, tidak signifikannya variabel ini di lapangan dipengaruhi oleh dinamika alokasi anggaran pada periode penelitian (2020–2024).

Berdasarkan data deskriptif Tabel 4.2, nilai rerata DAK berada pada Rp1.489,90 miliar dengan nilai maksimum mencapai Rp10.889,72 miliar. Fakta historis di lapangan menunjukkan bahwa sepanjang periode 2020 hingga 2022, Indonesia diterpa guncangan pandemi COVID-19, di mana pemerintah pusat melakukan kebijakan *refocussing* anggaran secara masif. Porsi DAK Fisik banyak yang dipotong dan dialihkan untuk jaring pengaman sosial darurat serta penanganan

medis pandemi jangka pendek, bukan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan jangka panjang. Selain itu, hambatan klasik di lapangan berupa rendahnya kapasitas administratif pemerintah daerah menyebabkan penyerapan DAK sering kali mengalami keterlambatan eksekusi (*delayed spending*), menciptakan *time-lag* pengaruh. Temuan tidak berpengaruhnya DAK ini sejalan dengan hasil riset Cahya Fahma Arrosyid dan Dwi Bayu Bawono (2023) serta Rizki Kurniasari (2021) yang menemukan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh langsung yang terukur terhadap lompatan nilai IPM di tahun berjalan.

4.4.5 Pengaruh Pajak Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Secara Simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Secara simultan, keempat variabel menghasilkan F hitung = 35,544 dengan Sig. = 0,000 < 0,05 dan Adjusted R² = 0,457. Artinya, Pajak Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama mampu menjelaskan 45,7% variasi Indeks Pembangunan Manusia di 33 provinsi Indonesia periode 2020–2024, sehingga H₅ diterima.

Temuan ini membuktikan bahwa sistem fiskal daerah secara holistik yang mencakup kombinasi penerimaan pajak mandiri, kapasitas ekonomi daerah, dan transfer fiskal dari pemerintah pusat memiliki relevansi dan daya penjas yang signifikan terhadap pembangunan manusia.. Hasil ini sejalan dengan Hanantoko (2020) dan Sulastri dan Efendri (2021) yang juga menemukan pengaruh simultan signifikan variabel fiskal terhadap IPM.